

Analisis Sentimen Publik terhadap Penertiban Bangunan di Kawasan Puncak Bogor pada Media Sosial Instagram

Ferdi Fajar Padilah¹, Faizal Pikri²

^{1,2}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: ferdifajar215@gmail.com

Keywords:
Sentiment Analysis
Public Policy
Puncak Bogor

Abstract: *The building control policy in the Puncak Bogor area has become a public issue widely discussed on social media due to its environmental, social, and economic impacts. This study aims to analyze public sentiment toward the policy through Instagram comments. The research used a quantitative approach with a sentiment analysis method based on Natural Language Processing (NLP). Data were collected through web scraping from Instagram comments related to the policy and analyzed using the IndoBERT model to classify sentiments into positive, negative, and neutral categories. The results showed that negative sentiment dominated public responses with 7,726 comments (65.4%), followed by positive sentiment with 2,820 comments (23.9%), and neutral sentiment with 1,260 comments (10.7%). Negative sentiment mainly related to social and economic impacts such as loss of livelihoods and business activities, while positive sentiment reflected support for environmental conservation and spatial planning. Therefore, more transparent and participatory public communication strategies are needed to improve public acceptance of the policy.*

Kata Kunci:
Analisis Sentimen
Kebijakan Publik
Puncak Bogor

Abstrak: Kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor menjadi isu yang banyak diperbincangkan masyarakat di media sosial karena menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan tersebut melalui komentar Instagram. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen berbasis *Natural Language Processing* (NLP). Data dikumpulkan melalui web scraping komentar Instagram yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dan dianalisis menggunakan model IndoBERT untuk mengklasifikasikan sentimen ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi respons masyarakat sebanyak 7.726 komentar (65,4%), diikuti sentimen positif sebanyak 2.820 komentar (23,9%), dan sentimen netral sebanyak 1.260 komentar (10,7%). Sentimen negatif terutama berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi seperti hilangnya mata pencaharian dan aktivitas usaha, sedangkan sentimen positif mencerminkan dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan penataan kawasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih transparan dan partisipatif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.

Pendahuluan

Kawasan Puncak yang membentang di sepanjang Jalan Raya Puncak, meliputi wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung, dan Cisarua di Kabupaten Bogor serta Kecamatan Cipanas dan Pacet di Kabupaten Cianjur, telah lama menjadi salah satu koridor wisata paling ramai di Jawa Barat (Halaman Bogor, 2021). Panorama perkebunan teh, udara sejuk, serta keberadaan berbagai fasilitas wisata, kuliner, dan akomodasi menjadikan kawasan ini sebagai destinasi utama wisatawan dari wilayah Jabodetabek setiap akhir pekan. Namun, tingginya aktivitas pembangunan yang berlangsung selama bertahun-tahun tanpa pengendalian tata ruang yang optimal telah menyebabkan perubahan signifikan terhadap kondisi lingkungan kawasan Puncak. Munculnya bangunan liar, lapak pedagang kaki lima (PKL) tanpa izin, serta alih fungsi lahan kawasan lindung menjadi hunian maupun tempat wisata telah menurunkan daya dukung lingkungan kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan di wilayah Puncak, tetapi juga memengaruhi wilayah hilir, khususnya Jakarta, melalui peningkatan risiko banjir yang terus berulang (Adri, 2024b).

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan langkah penertiban bangunan secara besar-besaran sejak pertengahan tahun 2024. Kebijakan ini dilandasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044 yang menetapkan kawasan Puncak sebagai kawasan lindung dan hutan produksi terbatas. Selain itu, penertiban juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum serta Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penertiban Bangunan. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pada tahap pertama yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2024, sebanyak 330 bangunan ditertibkan. Selanjutnya, tahap kedua pada 26 Agustus 2024 kembali menasar 196 bangunan di sepanjang jalur Gantole hingga Puncak Pass dengan melibatkan lebih dari 1.200 personel gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Penertiban kemudian dilanjutkan pada November 2024

terhadap bangunan yang kembali berdiri, sehingga total lebih dari 527 bangunan telah ditertibkan dalam kurun waktu tersebut (Setda Bogor, 2024; Setiawan, 2024).

Upaya penertiban kawasan Puncak semakin mendapatkan perhatian publik ketika Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Pasca banjir bandang yang terjadi di kawasan hulu Bogor pada awal Maret 2025, Gubernur Dedi Mulyadi turun langsung ke lapangan dan memerintahkan pembongkaran tempat wisata *Hibisc Fantasy* Puncak milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita Jabar, yang diketahui melanggar ketentuan izin bangunan. Tempat wisata tersebut tercatat memiliki luas bangunan mencapai 15.000 meter persegi, melebihi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hanya sebesar 4.800 meter persegi. Selain itu, pada tanggal 12–13 Maret 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyegelan terhadap empat vila yang berdiri di kawasan Hutan Produksi Terbatas, yaitu *Forest Hill*, *Sifor Afrika*, *Cemara*, dan *Pinus*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk mendukung penertiban bangunan yang melanggar tata ruang serta berencana memperluas kebijakan serupa ke wilayah lain, termasuk Kabupaten Cianjur. Kebijakan penertiban tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan pentingnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang berlaku (Laksono, 2025; Maulana, 2025).

Meskipun kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak dilakukan atas dasar kepentingan lingkungan dan penataan ruang, implementasinya memunculkan berbagai respons dari masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung langkah pemerintah karena dinilai mampu memperbaiki tata ruang kawasan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengurangi risiko bencana banjir di wilayah hilir. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut juga menuai penolakan, khususnya dari para pedagang dan pelaku usaha yang terdampak langsung akibat pembongkaran bangunan. Banyak masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. Sebagian pedagang bahkan menolak relokasi ke *Rest Area* Gunung Mas karena dianggap tidak mampu menjamin keberlangsungan usaha akibat minimnya jumlah pengunjung. Tidak

sedikit pula pedagang yang kembali mendirikan bangunan di lokasi sebelumnya setelah proses penertiban selesai dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan penertiban bangunan di kawasan Puncak tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, ekonomi, dan komunikasi kebijakan publik (Adri, 2024a).

Dalam konteks administrasi publik, respons masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi kebijakan, efektivitas implementasi, serta kualitas komunikasi publik yang dilakukan pemerintah (Mulanda & Adnan, 2023). Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membuka ruang partisipasi baru bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, maupun dukungan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka dan *real-time*. Salah satu platform yang aktif digunakan masyarakat Indonesia dalam mendiskusikan isu kebijakan publik adalah Instagram (Kusuma et al., 2024). Berdasarkan laporan Data Reportal (2025), jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 103 juta pengguna pada awal tahun 2025. Angka tersebut setara dengan 36,3 persen dari total populasi Indonesia dan 48,7 persen dari total pengguna internet nasional. Tingginya jumlah pengguna tersebut menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media berbagi konten visual, tetapi juga menjadi ruang interaksi publik dalam merespons isu sosial maupun kebijakan pemerintah melalui fitur komentar dan unggahan berita digital. Karakteristik Instagram yang memungkinkan penyebaran opini secara cepat menjadikan *platform* ini relevan untuk digunakan sebagai sumber data dalam memahami persepsi publik terhadap suatu kebijakan (Suhendra & Pratiwi, 2024).

Selain itu, besarnya jumlah komentar masyarakat di media sosial menyebabkan proses analisis secara manual menjadi kurang efektif untuk dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komputasional berbasis *Natural Language Processing* (NLP) untuk membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini publik secara lebih sistematis. Penelitian ini menggunakan model IndoBERT sebagai metode analisis sentimen karena model tersebut telah terbukti mampu melakukan klasifikasi opini berbahasa Indonesia secara akurat dan efisien pada data media sosial (Liu, 2012; Wilie et al., 2020). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1) mengetahui distribusi sentimen masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor melalui platform Instagram; (2) mengkaji tema serta isu yang paling dominan muncul dalam percakapan publik di Instagram mengenai kebijakan tersebut; dan (3) mendeskripsikan bagaimana hasil analisis sentimen beserta isu dominan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi komunikasi publik yang lebih responsif serta inklusif. Selaras dengan tujuan penelitian tersebut, terdapat tiga pertanyaan penelitian yang diajukan, yakni: (1) bagaimana distribusi sentimen publik terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor di Instagram; (2) tema dan isu apa saja yang paling banyak muncul dalam diskusi publik mengenai kebijakan tersebut; dan (3) bagaimana implikasi hasil analisis sentimen terhadap strategi komunikasi publik pemerintah.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik dan komunikasi kebijakan berbasis data media sosial, khususnya pada isu penataan ruang dan lingkungan. Penggunaan Instagram sebagai sumber data penelitian serta penerapan model IndoBERT dalam analisis sentimen juga memberikan variasi metodologis dalam penelitian analisis sentimen berbahasa Indonesia yang selama ini lebih banyak menggunakan platform X (Twitter). Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih terbuka, partisipatif, serta peka terhadap aspirasi masyarakat, sehingga pelaksanaan kebijakan penataan kawasan pada masa mendatang dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkeadilan.

Tinjauan Literatur

Kebijakan publik menurut Dye dalam Anggara (Anggara, 2018) adalah segala sesuatu yang dipilih atau tidak dipilih pemerintah untuk dilakukan dalam merespons

persoalan publik. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor merupakan bentuk intervensi aktif pemerintah untuk menegakkan aturan tata ruang, memulihkan fungsi ekologis kawasan, dan menertibkan pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai peruntukan. Nugroho (2023) menambahkan bahwa implementasi kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sering kali menimbulkan ketegangan antara logika pemerintah yang berorientasi pada ketertiban dan kepentingan administratif di satu sisi, dengan kepentingan ekonomi dan sosial warga yang terdampak di sisi lain. Ketegangan inilah yang kemudian menghasilkan dinamika opini publik yang kaya di ruang digital.

Opini publik yang terbentuk di media sosial tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh bagaimana isu dikemas dan dipresentasikan. Teori agenda *setting* yang dikemukakan McCombs (2014) menjelaskan bahwa media mempunyai pengaruh dalam menentukan isu-isu yang dipandang penting oleh masyarakat. Dalam era digital, fungsi ini tidak lagi menjadi monopoli media konvensional, melainkan turut dijalankan oleh pengguna media sosial melalui unggahan, komentar, dan interaksi daring. Lebih jauh, teori *framing* Scheufele (1999) menguraikan bahwa cara suatu isu dibingkai dalam pemberitaan maupun percakapan digital sangat menentukan bagaimana publik mengevaluasi kebijakan. Pemberitaan yang menonjolkan aspek keindahan kawasan Puncak pasca-penertiban akan menghasilkan evaluasi yang berbeda dibandingkan pemberitaan yang menonjolkan penderitaan pedagang yang digusur.

Platform Instagram dalam konteks ini berfungsi sebagai ruang publik digital yang relevan dengan konsep *public sphere* Habermas (2006). Habermas (2006), menegaskan bahwa komunikasi publik yang sehat mensyaratkan keterbukaan ruang bagi warga untuk menyampaikan pandangan, memberi kritik, dan berpartisipasi dalam evaluasi kebijakan secara rasional dan setara. Kolom komentar Instagram menjadi salah satu manifestasi ruang publik tersebut, di mana pengguna dari berbagai latar belakang bebas mengekspresikan dukungan maupun penolakan terhadap tindakan pemerintah tanpa melalui filter institusional. Semakin massifnya percakapan mengenai kebijakan penertiban Puncak Bogor di Instagram mencerminkan bahwa masyarakat menggunakan platform ini sebagai arena artikulasi kepentingan publik yang signifikan.

Perspektif keadilan sosial turut menjadi kerangka penting dalam memahami respons publik terhadap penertiban kawasan Puncak. Hendrawansyah & Abdullah (2024), menyatakan bahwa kebijakan relokasi dan penertiban PKL sering kali berhadapan dengan resistensi keras karena tidak cukup mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi kelompok rentan yang menggantungkan hidupnya pada lokasi yang ditertibkan. Temuan lapangan menunjukkan banyak pedagang Puncak yang menolak pindah ke Rest Area Gunung Mas karena sepi pengunjung, sementara warung yang mereka tinggalkan adalah sumber penghidupan satu-satunya selama puluhan tahun (Adri, 2024a). Dimensi ketidakadilan yang dirasakan inilah yang kemudian menjadi bahan bakar dominannya sentimen negatif dalam percakapan publik di media sosial.

Untuk melakukan analisis sentimen secara otomatis terhadap jumlah komentar yang besar, penelitian ini menerapkan pendekatan *Natural Language Processing* (NLP). Liu (2012), analisis sentimen merupakan proses komputasional yang digunakan untuk mengenali serta mengekstraksi opini, sikap, dan emosi yang terdapat dalam suatu teks. Sementara itu, model IndoBERT yang diperkenalkan oleh Wilie et al. (2020) adalah model berbasis Transformer yang dirancang khusus untuk bahasa Indonesia dalam kerangka penelitian IndoNLU. Model ini unggul dalam memahami konteks kalimat secara bidireksional, termasuk bahasa informal, singkatan, dan ekspresi emosional khas media sosial Indonesia yang kerap menjadi hambatan bagi model konvensional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji analisis sentimen terhadap kebijakan pemerintah menggunakan model IndoBERT maupun pendekatan NLP serupa. Pertama, Ihalauw et al. (2025) dalam penelitian berjudul "Analisis Sentimen Terhadap Kinerja Awal Pemerintahan Menggunakan IndoBERT dan SMOTE pada Media Sosial X" berhasil membuktikan bahwa IndoBERT mampu mengklasifikasikan sentimen publik terhadap kebijakan pemerintah dengan akurasi tinggi, bahkan setelah menangani ketidakseimbangan data menggunakan teknik SMOTE. Penelitian tersebut menghasilkan gambaran distribusi sentimen yang terukur dan *reproducible*, menjadikannya landasan metodologis yang kuat bagi penelitian-penelitian serupa.

Kedua, Sumartha (2025) melalui penelitian "Implementasi IndoBERT untuk Analisis Sentimen Opini Publik terhadap Kebijakan Kenaikan UKT di Era Pemerintahan"

menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap kebijakan pendidikan yang kontroversial didominasi oleh sentimen negatif, dengan IndoBERT mampu menangkap nuansa bahasa informal Twitter berbahasa Indonesia secara akurat. Penelitian ini membuktikan relevansi analisis sentimen berbasis NLP sebagai instrumen untuk memahami persepsi publik terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Ketiga, Manoppo et al. (2025) dalam penelitian "Analisis Sentimen Publik di Media Sosial Terhadap Kenaikan PPN 12% di Indonesia Menggunakan IndoBERT" mengaplikasikan pendekatan hybrid labeling yang menggabungkan metode berbasis leksikon dengan IndoBERT untuk menganalisis ribuan cuitan. Hasilnya menunjukkan sentimen negatif mendominasi respons publik terhadap kebijakan fiskal tersebut, sekaligus memberikan kontribusi teknis terhadap pengembangan pipeline klasifikasi sentimen berbahasa Indonesia yang lebih andal.

Ketiga penelitian di atas memberikan pijakan metodologis yang solid bagi penelitian ini, namun terdapat gap yang belum terjawab. Pertama, ketiga penelitian tersebut menggunakan platform X (Twitter) sebagai sumber data, sementara Instagram memiliki karakteristik pengguna dan pola interaksi yang berbeda, terutama dalam hal kedalaman komentar dan jangkauan demografi yang lebih luas di kalangan masyarakat umum Indonesia. Kedua, tidak ada penelitian yang secara spesifik menganalisis sentimen publik terhadap kebijakan tata ruang dan penertiban bangunan kawasan wisata, yang memiliki kompleksitas unik berupa tarik-menarik antara kepentingan lingkungan hidup, keadilan sosial bagi kelompok rentan, dan agenda pembangunan daerah. Ketiga, objek kebijakan penertiban kawasan Puncak Bogor yang melibatkan peran langsung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum pernah dikaji melalui pendekatan analisis sentimen berbasis NLP. Inilah kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen berbasis *Natural Language Processing* (NLP). Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang diperoleh diolah dalam bentuk angka sehingga dapat dianalisis secara objektif dan terukur. Menurut Creswell (2016), pendekatan kuantitatif merupakan

metode penelitian yang digunakan untuk menguji teori melalui analisis hubungan antar variabel dengan memanfaatkan data berbentuk numerik yang kemudian dianalisis menggunakan prosedur statistik. Pendekatan ini dinilai sesuai karena hasil klasifikasi sentimen dapat diukur, dihitung, serta dibandingkan guna mengetahui kecenderungan opini publik secara lebih objektif dan terukur.

Metode analisis sentimen digunakan untuk mengklasifikasikan komentar ke dalam tiga kategori, yaitu sentimen positif, negatif, dan netral. Menurut Liu (2012), menjelaskan bahwa analisis sentimen merupakan proses menganalisis opini, penilaian, sikap, serta emosi seseorang terhadap suatu topik melalui data berbentuk teks. Melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui arah kecenderungan tanggapan masyarakat terhadap kebijakan yang dibahas, terutama terkait kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor.

Pendekatan *Natural Language Processing* (NLP) digunakan untuk memproses teks komentar secara otomatis. Dalam penelitian ini, model IndoBERT dimanfaatkan sebagai alat utama untuk melakukan klasifikasi sentimen. Menurut Wilie et al. (2020), IndoBERT merupakan model bahasa berbasis *Transformer* yang dirancang khusus untuk Bahasa Indonesia dalam kerangka penelitian IndoNLU. Pemilihan model ini didasarkan pada kemampuannya yang lebih optimal dalam memahami konteks serta nuansa Bahasa Indonesia, termasuk bahasa tidak formal, singkatan, maupun ungkapan emosional yang sering muncul pada komentar di media sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari komentar pada unggahan Instagram terkait kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *web scraping* dengan memanfaatkan ekstensi *Instant Data Scraper* pada unggahan yang secara khusus membahas penertiban kawasan Puncak, termasuk unggahan dari akun media massa nasional maupun daerah yang telah terverifikasi. Selanjutnya, data tersebut diproses menggunakan bahasa pemrograman *Python* melalui platform Google Colab.

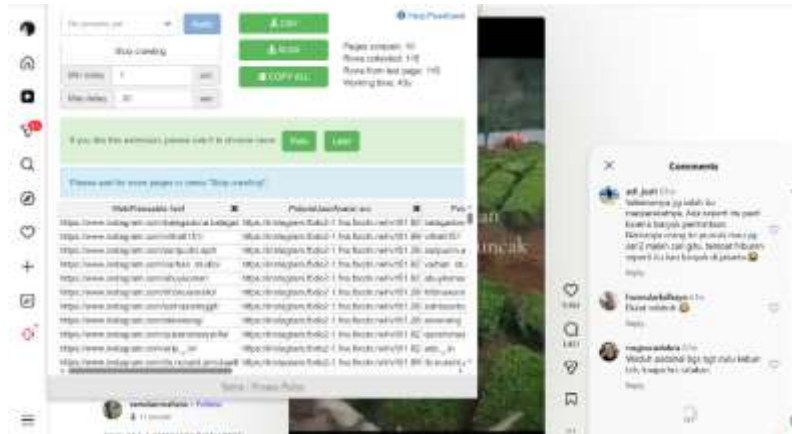
Teknik analisis data dilakukan di platform Google Colab melalui beberapa tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh komentar masyarakat yang memberikan tanggapan terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor melalui *platform* Instagram. Instagram dipilih karena menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan masyarakat untuk mendiskusikan berbagai isu kebijakan publik, termasuk persoalan penataan ruang dan lingkungan. Selain itu, unggahan dari akun media massa terverifikasi kerap menjadi pusat interaksi dan diskusi publik sehingga dinilai relevan sebagai objek penelitian analisis sentimen.

Data penelitian diperoleh dari 20 unggahan Instagram yang secara khusus membahas kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Bogor. Proses pengambilan data dilakukan pada periode 16–18 Mei 2026 dengan menggunakan teknik *web scraping* melalui ekstensi *Instant Data Scraper*. Teknik tersebut memungkinkan komentar pada unggahan yang relevan diekstraksi secara otomatis sehingga peneliti dapat memperoleh data opini publik dalam jumlah besar.

Berdasarkan proses pengumpulan data tersebut, diperoleh sebanyak 11.963 komentar yang selanjutnya disimpan dalam format .xlsx untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan Google Colab. Pada tahap seleksi awal, komentar yang tidak relevan seperti spam, promosi, komentar kosong, maupun komentar yang tidak berkaitan dengan isu penertiban bangunan dikeluarkan dari dataset. Adapun komentar yang dipertahankan merupakan komentar berbahasa Indonesia yang secara langsung menyinggung, menanggapi, atau memuat opini terkait kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa dataset yang digunakan sesuai dengan fokus penelitian serta mampu menggambarkan dinamika opini publik di media sosial secara lebih akurat. Pemanfaatan media sosial sebagai sumber data opini publik sejalan dengan pendapat Liu (2012) yang menyatakan bahwa sentimen digital dapat dianalisis guna memahami persepsi masyarakat terhadap suatu isu.



Gambar 1. Proses pengumpulan data komentar Instagram menggunakan ekstensi *Instant Data Scraper*.

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

id	username	fullname	bio	followers	following	posts
1	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
2	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
3	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
4	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
5	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
6	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
7	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
8	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
9	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
10	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
11	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
12	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
13	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
14	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
15	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
16	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
17	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
18	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
19	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...
20	https://www.instagram.com/...	...	...	...	...	...

Gambar 2. Tampilan dataset hasil scraping yang telah diunggah ke Google Colab.

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

2. Pra-Pemrosesan Teks (*Text Pre-Processing*)

Data komentar yang diperoleh kemudian melalui tahap pra-pemrosesan guna meningkatkan akurasi analisis. Tahapan ini meliputi: (a) pembersihan data dari karakter yang tidak relevan seperti emoji, URL, simbol, tanda baca berlebih, serta mention; (b) case folding, yaitu proses menyeragamkan seluruh huruf menjadi huruf kecil; (c) normalisasi kata tidak baku dan bahasa gaul menjadi bentuk baku; (d) tokenisasi, yakni pemecahan kalimat menjadi unit kata; (e) penghapusan stopword, yaitu kata-kata umum yang tidak memiliki kontribusi makna signifikan; serta (f) stemming menggunakan stemmer Bahasa Indonesia untuk mengembalikan kata ke bentuk dasar. Seluruh proses pra-pemrosesan ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab sesuai dengan standar pengolahan teks dalam analisis sentimen (Liu, 2012).

Setelah tahap pra-pemrosesan dilakukan, jumlah data yang semula terdiri dari 11.963 komentar mengalami reduksi akibat adanya data yang teridentifikasi sebagai spam, tidak relevan, duplikat, atau tidak dapat diproses secara tekstual. Pada tahap akhir, sebanyak 11.806 komentar berhasil dipertahankan dan digunakan sebagai dataset akhir yang siap dianalisis menggunakan model IndoBERT. Tahapan ini menjadi penting karena kualitas hasil klasifikasi sentimen sangat dipengaruhi oleh tingkat kebersihan, konsistensi, dan relevansi data yang digunakan dalam proses analisis.

	teks_mentah	teks_bersih	tokenized_output
0	Jukirnya pengen ditertibkan dengan bulldozer	jukirnya pengen ditertibkan dengan bulldozer	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]
1	Bukan aneh nama jga tempat wisata lah klu ga m...	bukan aneh nama jga tempat wisata lah klu tida...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]
2	Gebugan, paeahan, piraun ka jurang jukir mah ...	gebugan, paeahan, piraun ka jurang jukir mah. ...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]
3	Jawa barat memang sdh parah, apalagi bogor, pa...	jawa barat memang sdh parah, apalagi bogor, pa...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]
4	Seharusnya jangan ada parkir dong	seharusnya jangan ada parkir dong	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]
...	...	...	...
11804	bagus! tinggal ditata aja sisi jalannya, diad...	bagus! tinggal ditata aja sisi jalannya, diad...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]
11805	Nah begitu kan enak bersih... Kga ada yg merus...	nah begitu kan enak bersih... kga ada yang mer...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]
11806	Awas parkir pinggir jalan ada yg nagih uang pa...	awas parkir pinggir jalan ada yang nagih uang ...	[input_ids, token_type_ids, attention_mask]

Gambar 3. Contoh tampilan data komentar yang telah melalui proses pra-pemrosesan.
 Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

3. Analisis Sentimen Menggunakan Model IndoBERT

Analisis sentimen dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan model IndoBERT yang diimplementasikan ke dalam pipeline klasifikasi pada Google Colab tanpa melalui proses pelatihan ulang (*retraining*). Model IndoBERT secara otomatis mengklasifikasikan setiap komentar ke dalam kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral, berdasarkan konteks serta struktur bahasa yang terkandung di dalam teks.

Penggunaan IndoBERT dalam penelitian ini mengacu pada Wilie et al. (2020) yang menjelaskan bahwa IndoBERT merupakan model bahasa berbasis Transformer yang dikembangkan khusus untuk Bahasa Indonesia. Model ini dinilai lebih unggul dalam memahami makna dan konteks bahasa dibandingkan metode analisis sentimen tradisional, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dalam membaca opini publik.

	teks_mengah	teks_jemah	tokenized_mengah	tokenized_jemah	sentimen	sentimen_label	sentimen_score
0	Jumlahnya pengon diartikan dengan bulikisan	Jumlahnya pengon diartikan dengan bulikisan	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, negative, score]	0.955783753007	negative	0.955783
1	Bukan aneh rama (ga kemas) wisata lah itu ga m...	Bukan aneh rama (ga kemas) wisata lah itu kda...	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, negative, score]	0.8576001984035	negative	0.857600
2	Gebagan, pashan, pashan ka juring juk miah...	gebagan, pashan, pashan ka juring juk miah...	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, negative, score]	0.906163683708	negative	0.906163
3	Jawa barat memang adu pashan, apalagi bogor, pa...	Jawa barat memang adu pashan, apalagi bogor, pa...	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, positive, score]	0.8954570373108	positive	0.895458
4	Sekarangnya pengon ada parkir diong	Sekarangnya pengon ada parkir diong	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, negative, score]	0.9951571739106	negative	0.995157
...	...	...	...	...	...	...	...
11884	Bagat' tinggal ditiada apa nni jalannya, dipat...	bagat' tinggal ditiada apa nni jalannya, dipat...	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, positive, score]	0.945732028917	positive	0.945733
11885	Nah bagit' kan ora' berati... kga ada yg mihak...	nah bagit' kan ora' berati... kga ada yang mihak...	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, positive, score]	0.8932170734904	positive	0.893218
11886	Awas parkir pinggir jalan ada yg ngasih uang pa...	awas parkir pinggir jalan ada yang ngasih uang pa...	[input_id, token_type_id, attention_mask]	[label, negative, score]	0.7931452198104	negative	0.793145

Gambar 4. Hasil klasifikasi sentimen pada komentar Instagram menggunakan model IndoBERT di Google Colab.

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

4. Rangkuman Opini (Opinion Summarization)

Tahap terakhir mengikuti konsep opinion summarization menurut Liu (2012), yaitu menyajikan hasil klasifikasi secara visual dan deskriptif. Hasil akhir akan ditampilkan dalam bentuk distribusi jumlah komentar per kategori sentimen, wordcloud untuk masing-masing kategori, serta grafik batang atau pie chart. Rangkuman ini memberikan gambaran umum mengenai persepsi publik terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor.

Tahap akhir dalam penelitian ini mengacu pada konsep opinion summarization menurut Liu (2012), yaitu proses penyajian hasil klasifikasi sentimen secara visual dan deskriptif. Pada tahap ini, hasil analisis ditampilkan dalam bentuk distribusi jumlah komentar berdasarkan kategori sentimen, wordcloud untuk masing-masing kategori, serta visualisasi berupa grafik batang maupun diagram lingkaran (pie chart).

Rangkuman hasil tersebut digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai persepsi publik terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor secara lebih komprehensif dan mudah dipahami.

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil analisis sentimen publik terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor berdasarkan komentar pengguna Instagram. Analisis dilakukan terhadap 11.806 komentar yang telah melalui tahap pra-pemrosesan dan klasifikasi menggunakan model IndoBERT. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk distribusi sentimen, visualisasi wordcloud, serta identifikasi isu dominan yang muncul dalam percakapan publik. Penyajian hasil ini bertujuan untuk memberikan

gambaran mengenai kecenderungan opini masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan yang dilakukan pemerintah di kawasan Puncak Bogor.

Distribusi Sentimen Publik terhadap Penertiban Bangunan di Kawasan Puncak Bogor

Hasil klasifikasi sentimen menggunakan model IndoBERT menunjukkan adanya perbedaan kecenderungan opini publik terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor. Distribusi hasil klasifikasi sentimen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Sentimen Publik terhadap Penertiban Bangunan di Kawasan Puncak Bogor

No.	Kategori Sentimen	Jumlah Komentar	Persentase
1	Negatif	7.726	65,4%
2	Positif	2.820	23,9%
3	Netral	1.260	10,7%
Total		11.806	100%

Sumber: Hasil olahan penelitian (2026)

Berdasarkan Tabel 1, sentimen negatif menjadi kategori yang paling dominan dalam percakapan publik terkait kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor. Dari total 11.806 komentar yang dianalisis, sebanyak 7.726 komentar atau 65,4% termasuk ke dalam kategori sentimen negatif. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Instagram memberikan respons yang cenderung kritis terhadap kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah.

Komentar dengan sentimen negatif umumnya membahas dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat setelah adanya pembongkaran bangunan di kawasan Puncak. Banyak pengguna Instagram menyoroti kondisi pedagang dan pelaku usaha kecil yang kehilangan tempat usaha maupun sumber mata pencaharian akibat penertiban tersebut. Selain itu, terdapat pula komentar yang mempertanyakan proses penertiban serta menilai bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah kurang mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, sentimen positif memperoleh sebanyak 2.820 komentar atau sekitar 23,9% dari keseluruhan data. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebagian

masyarakat yang mendukung kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor. Komentar positif umumnya berkaitan dengan dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan, memperbaiki tata ruang kawasan wisata, serta mengurangi risiko banjir akibat alih fungsi lahan dan pembangunan liar di kawasan hulu.

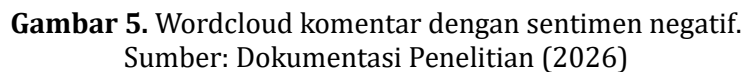
Sementara itu, sentimen netral berjumlah 1.260 komentar atau sebesar 10,7% dari total komentar yang dianalisis. Komentar dalam kategori ini umumnya berupa tanggapan singkat, pertanyaan, maupun komentar informatif yang tidak secara jelas menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap kebijakan penertiban bangunan.

Secara keseluruhan, hasil distribusi sentimen menunjukkan bahwa kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor memunculkan beragam respons dari masyarakat di media sosial. Dominasi sentimen negatif memperlihatkan bahwa isu dampak sosial dan ekonomi menjadi perhatian utama publik dalam menanggapi kebijakan tersebut.

Analisis Tema dan Isu Dominan

Analisis tema dan isu dominan dilakukan untuk mengidentifikasi topik utama yang paling sering muncul dalam percakapan publik terkait kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor. Penentuan tema diperoleh melalui pengamatan terhadap kata-kata yang paling dominan muncul pada setiap kategori sentimen, yang kemudian disajikan dalam bentuk wordcloud. Visualisasi tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melihat kecenderungan isu yang paling banyak diperbincangkan masyarakat, sekaligus menggambarkan aspek kebijakan yang paling sering memunculkan perhatian, baik berupa dukungan, kritik, maupun tanggapan lainnya dari pengguna Instagram.

Melalui wordcloud, pola percakapan publik dapat terlihat secara lebih jelas karena kata yang paling sering muncul akan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan kata lainnya. Dengan demikian, visualisasi ini dapat membantu menggambarkan fokus perhatian masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor, baik dari sisi dampak lingkungan, sosial, ekonomi, maupun penilaian terhadap tindakan pemerintah.



Selain itu, kata “wisata”, “Puncak”, “parkir”, “warung”, dan “usaha” menunjukkan bahwa isu yang paling banyak dibahas berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata di kawasan Puncak. Banyak komentar menilai bahwa penertiban bangunan berpotensi menurunkan pendapatan pedagang, mengurangi aktivitas wisata, serta mempersulit masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor informal di kawasan tersebut. Kata seperti “gusur”, “bongkar”, dan “lahan” juga mencerminkan kekhawatiran publik terhadap hilangnya tempat usaha maupun ruang ekonomi masyarakat kecil.

Secara keseluruhan, wordcloud sentimen negatif memperlihatkan bahwa dominasi kritik masyarakat lebih dipengaruhi oleh persoalan sosial-ekonomi, terutama terkait kehilangan mata pencaharian, dampak terhadap aktivitas usaha dan pariwisata, serta anggapan bahwa kebijakan penertiban bangunan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil di kawasan Puncak Bogor.



Pada kategori sentimen positif, wordcloud menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor banyak berfokus pada upaya perbaikan lingkungan dan penataan kawasan wisata. Kata-kata seperti “Puncak”, “bagus”, “semoga”, “indah”, dan “asri” muncul sebagai kata dominan, mencerminkan harapan masyarakat agar kawasan Puncak menjadi lebih tertata, nyaman,

dan kembali memiliki fungsi lingkungan yang baik setelah dilakukan penertiban bangunan.

Selain itu, kemunculan kata “hijau”, “pemandangan”, “kebun teh”, dan “alam” menunjukkan bahwa banyak pengguna Instagram mendukung kebijakan tersebut karena dinilai dapat menjaga kelestarian alam serta memperbaiki kondisi lingkungan kawasan wisata Puncak. Sebagian masyarakat menilai bahwa pembongkaran bangunan liar dan penataan kawasan dapat mengembalikan keindahan serta daya tarik wisata alam yang sebelumnya terganggu akibat pembangunan yang tidak terkendali.

Kata-kata seperti “mantap”, “setuju”, “bersih”, dan “aman” juga memperlihatkan adanya apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penertiban bangunan. Dukungan tersebut umumnya berkaitan dengan anggapan bahwa kebijakan penertiban diperlukan untuk menjaga tata ruang kawasan, mengurangi kemacetan, serta mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi menyebabkan banjir dan bencana di kawasan hulu. Kemunculan kata “pemerintah”, “bapak”, dan “gubernur” menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memberikan penilaian positif terhadap tindakan pemerintah yang dianggap tegas dalam menata kawasan Puncak Bogor.

Di sisi lain, kata “pedagang”, “tempat”, dan “rest area” menunjukkan bahwa sebagian komentar positif juga menyinggung pentingnya penyediaan lokasi alternatif bagi masyarakat terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mendukung kebijakan penertiban, masyarakat tetap berharap pemerintah memberikan solusi yang layak bagi pedagang dan pelaku usaha kecil.

Secara keseluruhan, wordcloud sentimen positif memperlihatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor terutama didorong oleh harapan terhadap terciptanya lingkungan yang lebih tertata, bersih, hijau, dan aman, serta pemulihan fungsi kawasan wisata dan kawasan lindung di wilayah Puncak Bogor.



Gambar 7. Wordcloud komentar dengan sentimen netral.
Sumber: Dokumentasi Penelitian (2026)

Pada kategori sentimen netral, wordcloud menunjukkan bahwa sebagian besar komentar bersifat informatif dan deskriptif tanpa secara jelas menunjukkan dukungan maupun penolakan terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor. Kata-kata seperti “Puncak”, “buat”, “biar”, dan “mau” muncul sebagai kata dominan, menandakan bahwa banyak pengguna Instagram lebih banyak membahas kondisi kawasan, aktivitas masyarakat, maupun situasi pasca-penertiban tanpa memberikan penilaian emosional tertentu.

Kemunculan kata “rest area”, “parkir”, “jalan”, “warung”, dan “pelabaran jalan” menunjukkan bahwa komentar netral banyak berkaitan dengan persoalan teknis penataan kawasan dan fasilitas umum di Puncak Bogor. Sebagian pengguna membahas kemungkinan relokasi pedagang, kondisi lalu lintas, area parkir, maupun penggunaan rest area sebagai alternatif tempat usaha setelah penertiban dilakukan. Komentar pada kategori ini umumnya berupa saran, pertanyaan, atau penyampaian informasi terkait kondisi lapangan.

Selain itu, kata seperti “Satpol PP”, “pemerintah”, “bongkar”, dan “tertib” memperlihatkan bahwa sebagian komentar hanya menjelaskan proses penertiban atau menyebut pihak yang terlibat tanpa menunjukkan sikap mendukung maupun mengkritik kebijakan. Kata “kopi”, “Indomie”, “jagung”, dan “warpat” juga menunjukkan adanya

komentar yang sekadar membahas aktivitas wisata dan kebiasaan masyarakat di kawasan Puncak sebagai bagian dari percakapan umum di kolom komentar.

Secara keseluruhan, wordcloud sentimen netral memperlihatkan bahwa percakapan publik pada kategori ini lebih banyak berisi informasi, penjelasan kondisi kawasan, serta diskusi teknis mengenai penataan dan aktivitas wisata di Puncak Bogor tanpa adanya kecenderungan opini yang kuat terhadap kebijakan penertiban bangunan yang dilakukan pemerintah.

Implikasi Temuan terhadap Komunikasi Publik dalam Penertiban Kawasan Puncak Bogor

Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah dalam kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Dominasi sentimen negatif pada komentar Instagram memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat merasa kebijakan penertiban lebih banyak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi dibandingkan manfaat yang secara langsung mereka rasakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi kebijakan belum sepenuhnya mampu menjelaskan tujuan penertiban, manfaat jangka panjang, maupun solusi yang disiapkan bagi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, kemunculan sentimen positif menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menata kawasan wisata, dan mengurangi kerusakan tata ruang di wilayah Puncak Bogor. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya memahami pentingnya penataan kawasan sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Namun demikian, dukungan tersebut tetap disertai harapan agar pemerintah memperhatikan kondisi pedagang, pelaku usaha kecil, dan masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian akibat pembongkaran bangunan.

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah perlu dilakukan secara lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan alasan penertiban dari sisi aturan dan

lingkungan, tetapi juga perlu menjelaskan bentuk solusi yang diberikan kepada warga terdampak, seperti relokasi usaha, penyediaan rest area, maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas dan terbuka dapat membantu mengurangi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

Selain itu, tingginya aktivitas diskusi publik di media sosial menunjukkan bahwa Instagram telah menjadi ruang komunikasi publik yang penting dalam membentuk opini masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, media sosial perlu dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi satu arah, tetapi juga sebagai media dialog dan interaksi dengan masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan media sosial untuk memberikan klarifikasi, menjawab kritik publik, serta menyampaikan perkembangan kebijakan secara berkala agar masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses penataan kawasan.

Secara keseluruhan, hasil analisis sentimen memperlihatkan bahwa keberhasilan penertiban kawasan Puncak Bogor tidak hanya bergantung pada penegakan aturan tata ruang, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang inklusif, terbuka, dan memperhatikan aspek sosial-ekonomi masyarakat terdampak. Strategi komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan sekaligus menciptakan hubungan yang lebih konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor didominasi oleh sentimen negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan penertiban tidak hanya dipersepsikan sebagai upaya penataan lingkungan, tetapi juga sebagai kebijakan yang menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Dominasi komentar yang membahas kehilangan tempat usaha, penurunan pendapatan, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan mata pencaharian menunjukkan bahwa masyarakat menilai kebijakan berdasarkan dampak langsung yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-

hari. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Dye dalam Anggara (Anggara, 2018) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan pemerintah dalam menangani persoalan publik yang selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang terdampak kebijakan.

Di sisi lain, kemunculan sentimen positif memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam melakukan penataan kawasan Puncak Bogor. Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, memperbaiki tata ruang, serta mengurangi risiko bencana akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak terkendali. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya penertiban kawasan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kawasan wisata. Namun demikian, dukungan tersebut tetap disertai harapan agar pemerintah memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang terdampak langsung akibat pembongkaran bangunan.

Pola percakapan yang muncul di Instagram juga menunjukkan keterkaitan dengan teori opini publik, khususnya konsep agenda *setting* dan *framing*. McCombs (2014) menjelaskan bahwa media memiliki peran dalam menentukan isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pemberitaan mengenai penertiban bangunan dan kerusakan lingkungan di kawasan Puncak mendorong masyarakat untuk memusatkan perhatian pada isu tata ruang, lingkungan, dan dampak sosial-ekonomi kebijakan. Selain itu, framing media mengenai penertiban kawasan turut memengaruhi cara masyarakat menilai kebijakan, di mana sebagian masyarakat memandang penertiban sebagai langkah penyelamatan lingkungan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi warga.

Temuan penelitian juga memperlihatkan fungsi media sosial sebagai ruang komunikasi publik sebagaimana dijelaskan Habermas (2006) dalam konsep *public sphere*. Instagram menjadi ruang diskusi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, dukungan, maupun aspirasi terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka. Tingginya interaksi dan keberagaman komentar menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa masyarakat menggunakan media sosial untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan kebijakan secara adil dan transparan.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik dalam pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan Puncak Bogor. Komunikasi kebijakan tidak cukup hanya menekankan aspek penegakan aturan dan pelestarian lingkungan, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara lebih transparan mengenai tujuan kebijakan, proses penertiban, serta solusi yang disiapkan bagi masyarakat, seperti relokasi usaha, penyediaan area alternatif berdagang, maupun program pemberdayaan ekonomi. Strategi komunikasi yang lebih partisipatif dapat membantu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Data penelitian hanya diperoleh dari komentar Instagram sehingga belum sepenuhnya mewakili keseluruhan pandangan masyarakat terhadap kebijakan penertiban kawasan Puncak Bogor. Selain itu, analisis sentimen berbasis IndoBERT memiliki keterbatasan dalam memahami konteks sarkasme, ironi, maupun makna implisit dalam komentar media sosial. Penelitian ini juga terbatas pada pendekatan kuantitatif berbasis teks sehingga belum menggali pengalaman langsung masyarakat terdampak secara mendalam.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dari berbagai *platform* media sosial lain seperti X, TikTok, atau Facebook agar memperoleh gambaran opini publik yang lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat mengombinasikan analisis sentimen dengan wawancara atau pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman masyarakat terdampak secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas strategi komunikasi publik pemerintah dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap kebijakan penataan kawasan dan lingkungan.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap kebijakan penertiban bangunan di kawasan Puncak Bogor didominasi oleh sentimen negatif. Mayoritas komentar pada media sosial Instagram menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama terkait kehilangan tempat usaha, penurunan pendapatan, serta kekhawatiran terhadap keberlangsungan mata pencaharian warga terdampak. Di sisi lain, sentimen positif menunjukkan adanya dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperbaiki tata ruang, dan menata kawasan wisata Puncak Bogor agar lebih tertib dan aman.

Analisis *wordcloud* memperlihatkan bahwa percakapan publik tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga pada persoalan sosial, ekonomi, dan komunikasi kebijakan pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima tujuan kebijakan penertiban kawasan, namun tetap mengharapkan adanya perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat kecil yang terdampak langsung akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika opini publik terhadap kebijakan penataan kawasan melalui pendekatan analisis sentimen berbasis *Natural Language Processing* (NLP) menggunakan model IndoBERT. Pemanfaatan media sosial sebagai sumber data juga menunjukkan bahwa Instagram menjadi ruang komunikasi publik yang penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi publik yang lebih transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kondisi masyarakat terdampak. Selain itu, diperlukan penyediaan solusi yang lebih jelas, seperti relokasi usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penataan kawasan yang tetap mempertimbangkan keberlangsungan sosial-ekonomi warga. Dengan demikian, kebijakan penertiban kawasan tidak hanya berorientasi pada aspek lingkungan dan tata ruang, tetapi juga mampu menciptakan rasa keadilan dan penerimaan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adri, A. (2024a). *Pedagang Kembali Berjualan di Jalur Puncak Bogor, Penataan Kawasan Terancam Gagal*. Wwww.Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/pedagang-kembali-berjualan-di-puncak-bogor-kebijakan-penataan-kawasan-wisata-harus-komprehensif>
- Adri, A. (2024b). *Puncak Bogor Perlu Rencana Detail Tata Ruang*. Wwww.Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/puncak-bogor-perlu-rencana-detail-tata-ruang>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat*. Pustaka Pelajar.
- Data Reportal. (2025). *Digital 2025: Indonesia*. Datareportal.Com. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Habermas, J. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. *Communication Theory*, 16(4), 411–426.
- Halaman Bogor. (2021). *Kawasan Puncak Bogor - Cianjur*. Wwww.Halamanbogar.Com. <https://www.halamanbogar.com/2021/12/kawasan-puncak-bogor-cianjur.html>
- Hendrawansyah, F., & Abdullah, Z. (2024). *RESISTENSI PKL TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI DI PASAR SUNGAI DAMA KEL. SUNGAI DAMA KEC. SAMARINDA ILIR KOTA SAMARINDA*.
- Ihalauw, S. A., Lapatta, N. T., Nugraha, D. W., & Lamasitudju, C. A. (2025). Analisis Sentimen Terhadap Kinerja Awal Pemerintahan Menggunakan IndoBERT Dan SMOTE Pada Media Sosial X. *Jurnal Algoritma*, 22(2), 803–815.
- Kusuma, D. A., Yendra, M., Bakhtiar, R., Takdir, M., & Handrina, E. (2024). Pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi pemerintah dan masyarakat dalam era digital. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 5(1), 23–32.
- Laksono, M. Y. (2025). *Daftar 11 Bangunan dan Obyek Wisata di Bogor yang Disegel Pemerintah*. Wwww.Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/15/114639021/daftar-11-bangunan-dan-obyek-wisata-di-bogor-yang-disegel-pemerintah>
- Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*.

- Manoppo, M. R., Kolang, I. C., Fiat, D. N. N., Mawara, R. M. C., Sumarno, A. D. P., Yusupa, A., & Tarigan, V. (2025). Analisis sentimen publik di media sosial terhadap kenaikan PPN 12% di Indonesia menggunakan IndoBERT. *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Teknologi Informasi*, 4(2), 152–163.
- Maulana, R. (2025). *Dedi Mulyadi: Setelah Puncak, Penertiban Bergeser ke Cianjur*. Wwww.Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/jabar/2882575/dedi-mulyadi-setelah-puncak-penertiban-bergeser-ke-cianjur>
- McCombs, M. E., & Guo, L. (2014). Agenda-setting influence of the media in the public sphere. *The Handbook of Media and Mass Communication Theory*, 249–268.
- Mulanda, D. M., & Adnan, M. F. A. (2023). Implementasi Teori Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 8(2), 1–13.
- Nugroho, R. (2023). *Public policy 7: Dinamika kebijakan publik, analisis kebijakan publik, manajemen politik kebijakan publik, etika kebijakan publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103–122.
- Setda Bogor. (2024). *Pemkab Bogor Serius Tata Kawasan Puncak, Penertiban Tahap II Berlanjut Bangunan Liar di sepanjang Jalur Gantole-Puncak Pass Dibongkar*. Setda.Bogorkab.Go.Id. <https://setda.bogorkab.go.id/berita/seputar-opd/pemkab-bogor-serius-tata-kawasan-puncak-penertiban-tahap-ii-berlanjut-bangunan-liar-di-sepanjang-jalur-gantole-puncak-pass-dibongkar>
- Setiawan, M. F. (2024). *Satpol PP Bogor pastikan bongkar kembali bangunan warpat di Puncak*. Wwww.Antaraneews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/4453537/satpol-pp-bogor-pastikan-bongkar-kembali-bangunan-warpat-di-puncak>
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293–315.
- Sumartha, D. K. (2025). IMPLEMENTASI INDOBERT UNTUK ANALISIS SENTIMEN OPINI PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN UKT DI ERA PEMERINTAHAN. *Jurnal*

Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 13(3S1).

Wilie, B., Vincentio, K., Winata, G. I., Cahyawijaya, S., Li, X., Lim, Z. Y., Soleman, S., Mahendra, R., Fung, P., & Bahar, S. (2020). IndoNLU: Benchmark and resources for evaluating Indonesian natural language understanding. *Proceedings of the 1st Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics and the 10th International Joint Conference on Natural Language Processing*, 843–857.